

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan terbentuknya BMT, Koperasi, Perbankan dan sejumlah lembaga keuangan lainnya di Indonesia, sebagian masyarakat menyadari besarnya potensi yang bersifat materiil pada lembaga-lembaga tersebut. Akan tetapi hingga sekarang lembaga-lembaga keuangan baru mendistribusikan dana yang bersifat konsumtif. Pada kenyataannya, lembaga yang telah mengfungsikan dana secara produktif masih sangat langka. Padahal kekuatan lembaga-lembaga serupa itu sangat potensial untuk dijadikan ladang pemberdayaan ekonomi rakyat.

Sementara itu, lembaga yang telah familiar sering digunakan oleh masyarakat serta dianggap berpeluang besar untuk difungsikan sebagai pusat pengembangan masyarakat yakni BMT dan Koperasi. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang meminjam uang pada BMT dan Koperasi hanya digunakan untuk konsumtif, dan tidak berjalan semestinya menjadi pinjaman produktif. Dikarenakan pada setiap pinjaman berlangsung, tidak disertai dengan pemantauan dan laporan keuangan sipenerima dana selama pembiayaan berlangsung. Sehingga terkadang dana pinjaman tersebut tidak berjalan dengan efektif.

Maka dari itu pemerintah berupaya untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Dalam memutuskan rantai kemiskinan, dilakukan usaha dengan menitikberatkan pada pemberdayaan dengan peningkatan produktivitas kaum perempuan, karena dalam berbagai hal perempuan selalu menjadi korban atau pihak yang dikorbankan. Dalam hal ini Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI mengambil langkah-langkah strategis diantaranya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 58/SK/MENEG.PP/XII/2004 tentang Penetapan Kebijakan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Salahsatu tindak nyata dari kebijakan ini adalah dengan dikembangkannya model Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri). (BPPM, 2011)

Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi berbasis pengentasan kemiskinan yang bernama Program Desa PRIMA, memiliki tujuan yang sama dengan BMT yaitu bertujuan untuk memberdayakan ekonomi umat, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan produktivitas. Namun terdapat perbedaan antara BMT dengan program pemerintah Desa PRIMA. Letak perbedaannya yaitu jika Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), penyalurannya dalam bentuk pembiayaan pada usaha berskala kecil menengah dan mewajibkan pengembalian dananya. Berbeda dengan BMT, program

pemerintah Desa PRIMA ini menghibahkan dananya yang akan menjadi milik bersama atau anggota Desa PRIMA pada Desa terpilih, kemudian pemerintah desa membuat dan menunjuk orang-orang yang akan dikelompokkan menjadi berbagai macam kelompok inovasi produk UMKM yang mendapat modal untuk berwirausaha dan setiap kelompok diberikan waktu selama 10 bulan untuk mengembalikan dana pada pengurus Kas Desa PRIMA dengan bunga 1% setiap bulannya dan hasil dari bunga pinjaman dana tersebut yang nantinya diperuntukkan di pinjamkan lagi kepada kelompok Desa PRIMA baru di desa tersebut yang akan ikut bergabung atau menjadi anggota, namun kelompok Desa PRIMA juga diharuskan kelompok UMKMinya untuk melaporkan keuangannya per-enam bulan sekali pada kantor BPPM DIY. Selain itu pemerintah juga rutin melakukan pemantauan perkembangan pemberdayaan Desa PRIMA.

Maka dari itu sudah menjadi tugas dari pemerintah yang bernaung dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk lebih memperhatikan masyarakat terutama masyarakat desa yang tertinggal yang masih banyak manusia usia produktif yang masih menjadi pengangguran. Lembaga Pemerintah yang peneliti maksud disini yaitu Kantor Pemerintah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Pemda DIY yang berkewajiban menaungi, mengajarkan, dan membimbing masyarakat agar menjadi masyarakat yang maju dan sejahtera. Menurut Kelsey dan Hearne

sebagaimana dikutip oleh M.Anwas, bahwa falsafah penyuluhan dalam pemberdayaan harus berpijak pada pentingnya pengembangan individu didalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu falsafahnya adalah berkerjasama dengan masyarakat untuk membantu mereka agar dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia.

BPPM Pemda DIY pada 2014 hingga 2015 mengadakan program Dana Hibah dan Desa PRIMA yang bertujuan untuk memberi modal usaha pada masyarakat desa yang berpotensi. Selain memberi modal usaha, Pemerintah Kantor BPPM Pemda DIY juga memberi sosialisasi terlebih dahulu untuk memberi bekal dan membimbing masyarakat desa untuk mengelola potensi yang ada didesa mereka masing masing. Adapun tujuan program Dana Hibah dan Desa PRIMA ini yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa yang berpotensi dan mengurangi pengangguran yang terlampau banyak didesa yang rata-rata pekerjaannya hanya mengandalkan dari berkebun dan bertani. Dilihat dari potensi yang dimiliki desa yaitu hasil kebun ubi-ubian dan hasil laut yang terdapat pada desa berpotensi, pemerintah bertujuan untuk membuat suatu kelompok-kelompok UMKM pada setiap desa agar mengolah kembali hasil kebun dan laut yang mereka kelola agar menjadi suatu produk bernilai ekonomis yang dapat mereka pasarkan guna menambah pemasukan khususnya ibu-ibu rumah tangga yang menganggur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latarbelakang Masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kepada kelompok Desa PRIMA?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh kelompok Desa PRIMA dan BPPM dalam melaksanakan program Desa PRIMA?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa berhasilnya program pemerintah yang disosialisasikan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Pemda DIY dan yang dilaksanakan oleh Desa Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui perkembangan Kelompok UMKM Desa Kemadang.Tanjungsari, Gunungkidul selama berlangsungnya program Desa PRIMA.
3. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh program Desa PRIMA pemerintah dan sosialisasi pengadaan Kelompok UMKM terhadap pengangguran Desa Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah terutama pemerintah kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Pemda DIY dalam menyalurkan dana bantuan yang menyangkut masalah kemiskinan dan mengatasi pengangguran.
2. Sebagai bahan pengetahuan bagi Pemerintah atas keberhasilan program yang dibuat oleh pemerintah.
3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis.
4. Menambah wawasan penulis, terkhusus pada bidang yang diteliti.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan ditambahkan dalam penulisan skripsi ini bertujuan memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami skripsi ini. sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN.

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi berupa jurnal.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci model penelitian yang digunakan serta jenis penelitian, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan analisis data yang digunakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan dari bab ini akan ditarik kesimpulan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari hasil penelitian, sedangkan saran merupakan masukan yang diberikan berdasarkan kesimpulan penelitian.